



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

Pasal 1

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
Pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 10-6-2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,



CATUR HERTIYAWAN

NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 49 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 JUNI 2019

REKAP KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4
1	15	2	
2	14	30	
3	13	10	
4	12	97	
5	11	3429	
6	10	41	
7	9	887	
8	8	1727	
9	7	633	
10	6	1450	
11	5	715	
12	4	3	
13	3	515	
14	2	0	
15	1	57	
Jumlah		9,596	

BUPATI PONOROGO

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,

  
CATUR HERTIYAWAN

NIP. 19640707 199303 1 008

**DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
<b>I</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
<b>1</b>	<b>Sekretaris Daerah</b>	15	1	
<b>2</b>	<b>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	14	1	
<b>3</b>	<b>Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</b>	12	1	
4	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	8	1	
5	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	9	1	
<b>6</b>	Kepala Sub Bagian Kerjasama, Perbatasan Wilayah dan Pertanahan	9	1	
<b>7</b>	<b>Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</b>	12	1	
8	Kepala Sub Bagian Agama dan Pendidikan	9	1	
9	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat	9	1	
10	Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan	9	1	
<b>11</b>	<b>Kepala Bagian Hukum</b>	12	1	
12	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9	1	
13	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan	9	1	
14	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum	9	1	
<b>15</b>	<b>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>	14	1	
<b>16</b>	<b>Kepala Bagian Administrasi Perekonomian</b>	12	1	
17	Kepala Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Jasa	9	1	
18	Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah	9	1	
<b>19</b>	<b>Kepala Bagian Administrasi Pembangunan</b>	12	1	
20	Kepala Sub Bagian Bina Program	9	1	
21	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	9	1	
22	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	1	
<b>23</b>	<b>Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam</b>	12	1	
24	Kepala Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Pertanian	9	1	
25	Kepala Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	9	1	
<b>26</b>	<b>Kepala Bagian Layanan Pengadaan</b>	12	1	
27	Kepala Sub Bagian Sengketa Barang dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Barang dan Jasa	9	1	
28	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9	1	
<b>29</b>	<b>Asisten Administrasi Umum</b>	14	1	
<b>30</b>	<b>Kepala Bagian Umum</b>	12	1	
31	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	1	
32	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9	1	
33	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
L	<b>KECAMATAN PUDAK</b>			
871	<b>Camat Puduk</b>	12	1	
872	<b>Sekretaris Camat Puduk</b>	11	1	
873	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1	
874	Kepala Subbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan	9	1	
875	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8	1	
876	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	1	
877	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1	
878	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	1	
879	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1	

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,

  
CATUR HERTIYAWAN

NIP. 19640707 199303 1 008

**DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, JABATAN LAINNYA, UNIT ORGANISASI, KELAS JABATAN  
 DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

No.	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
<b>I</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	13	1	
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	13	1	
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.	Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	13	1	
<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</b>					
4	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	6	1	
5	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	5	1	
6	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	5	1	
7	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sub Bagian Otonomi Daerah	7	1	
8	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Otonomi Daerah	7	1	
9	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Sub Bagian Otonomi Daerah	6	1	
10	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	Sub Bagian Kerjasama, Perbatasan Wilayah dan Pertanahan	7	1	
11	Analisis Batas Wilayah	Sub Bagian Kerjasama, Perbatasan Wilayah dan Pertanahan	7	1	
12	Pengelola Batas Wilayah, Rupabumi dan PATEN	Sub Bagian Kerjasama, Perbatasan Wilayah dan Pertanahan	6	0	
<b>BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN</b>					
13	Analisis potensi Masjid	Sub Bagian Agama dan Pendidikan	7	1	
14	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Agama dan Pendidikan	5	1	
15	Pengelola Barang Milik Negara	Sub Bagian Agama dan Pendidikan	6	1	
16	Pengadministrasi Persuratan	Sub Bagian Agama dan Pendidikan	5	1	
17	Pengadministrasi data penyajian dan publikasi	Sub Bagian Agama dan Pendidikan	5	1	

No.	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1760	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	6	1	
1761	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan Umum	6	1	
1762	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan Umum	5	1	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,

  
CATUR HERTIYAWAN  
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO,  
ttd  
H. IPONG MUCHLISSONI

**DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5)		FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3)		FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3)		FAKTOR 4 Hubungan Personal				FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8)		FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6)		SITUASI KHUSUS
										4A Sifat Hubungan (Level 1~4)		4B Tujuan Hubungan (Level 1~4)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
I	SEKRETARIAT DAERAH																	
1	Sekretaris Daerah	15	3555	2	350	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1225	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975	
3	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575	
4	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
5	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310	
6	Kepala Sub Bagian Kerjasama, Perbatasan Wilayah dan Pertanahan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310	
7	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575	
8	Kepala Sub Bagian Agama dan Pendidikan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310	
9	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310	
10	Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310	
11	Kepala Bagian Hukum	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575	
12	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310	
13	Kepala Sub Bagian Peraturan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1~5)		FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1~3)		FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (Level 1~3)		FAKTOR 4 Hubungan Personal				FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1~8)		FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1~6)		SITUASI KHUSUS
										4A Sifat Hubungan (Level 1~4)		4B Tujuan Hubungan (Level 1~4)						
866	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
867	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
868	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
869	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
870	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
L	KECAMATAN PUDAK																	
871	Camat Puduk	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575	
872	Sekretaris Camat Puduk	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575	
873	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
874	Kepala Subbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310	
875	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
876	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
877	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
878	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	
879	Kepala Seksi Pelayanan Umum	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310	

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,

  
CATUR HERTIYAWAN

NIP. 19640707 199303 1 008

**DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1~6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14			
I	SEKRETARIAT DAERAH																						
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;	Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	13	2715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5	
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	13	2715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5	
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.	Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	13	2715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM																							
4	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
5	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
6	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
7	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sub Bagian Otonomi Daerah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
8	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Otonomi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	

No	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)		FAKTOR 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1~6)		FAKTOR 6 Hubungan Personal (Level 1~4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		FAKTOR 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
1758	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
1759	Pengelola data Keamanan dan Ketertiban	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
1760	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
1761	Pengolah Data Pelayanan	Seksi Pelayanan Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
1762	Pengadministrasi Umum	Seksi Pelayanan Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

BUPATI PONOROGO

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH,

  
CATUR HERTIYAWAN

NIP. 19640707 199303 1 008